



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**DINAS KESEHATAN**



# RENCANA KERJA R E N J A 2024



## KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT dengan telah selesainya penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, dinyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Rencana Kerja tahun 2024 ini telah mengakomodir program prioritas meliputi operasional RS, pengadaan alkes dan peralatan penunjang, percepatan penurunan stunting, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyediaan Jaminan Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat kota Solok

Semoga Rencana Kerja dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

Solok, Januari 2023  
**Kepala Dinas Kesehatan**

**DR. Ns. Elvi Rosanti, S.Kep.M.Kes**  
NIP. 19690509 199203 2 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
<b>BAB I      Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan tujuan .....	3
1.4. Sistematika .....	3
<b>BAB II     Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu</b>	<b>5</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	20
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Solok.....	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	27
<b>BAB III    Tujuan dan Sasaran</b>	<b>38</b>
3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional .....	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan .....	39
<b>BAB IV     Rencana kerja dan Pendanaan</b>	<b>43</b>
4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota .....	43
4.2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.....	44
4.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusi Kesehatan.....	45
4.4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.....	45
4.5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.....	46
<b>BAB V      Penutup</b>	<b>59</b>
<b>Lampiran Dokumen GBS/GAP</b>	

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun 2021.....	5
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Solok .....	6
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Solok	33
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Solok.....	39
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Solok.....	59
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Target Kinerja .....	63
Tabel 4.1	Rumusan dan Rencana Kegiatan PD Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Solok.....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan perpu Nomor 2 Tahun 2014, dinyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2014 jugamewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rentra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kesehatan Kota Solok sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Solok merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Kesehatan yang berjangka waktu 1(satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Solok pada tahun 2024.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara nomor 4700)
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan perpu Nomor 2 Tahun 2014.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
6. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2022.
7. Permendagri 86/2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022;
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 01)
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2022-2026

11. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 31 Tahun 2013

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Tahun 2024 yang menjabarkan RPJMD Kota Solok Tahun 2022-2026 dan rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2022-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Solok.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun 2024 yaitu :

1. Sebagai pedoman dalam pembuatan perencanaan Tahun 2024 yang memuat visi, misi, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan
2. Mewujudkan sinronisasi, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan jangka menengah antara Rencana Strategis Dinas Kesehatan dengan RPJMD Kota Solok Tahun 2022-2026 dengan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024.
3. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan serta penganggaran Tahun 2024.

### **1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA**

Rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun 2024 ini disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU**

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022), mengacu kepada APBD tahun berjalan (2022). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra, analisis kinerja Pelayanan, isu-isu penting penyeleggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan.

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan 2024 dan lampiran tabel rencana program dan kegiatan

#### BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah- kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Solok. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Solok meliputi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pengukuran Indikator kinerja utama tahun 2022 telah dilakukan dengan hasil sebagian indikator kinerja sebagian sudah mencapai target, namun masih ada indikator kinerja yang belum mencapai target yakni indikator AKI dan AKB dan penurunan angka kesakitan. Hasil pengukuran kinerja indikator utama dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Realisasi	Kriteria Penilaian
1	Usia Harapan Hidup	74,08	74,06	99,97	Tidak memenuhi target
2	Angka Kematian Ibu	75 per 100.000 kelahiran hidup	146,9 per 100.000 kelahiran hidup	4,1	Tidak Memenuhi target
3	Angka Kematian Bayi	7 per 1.000 kelahiran hidup	8,8 per 1.000 kelahiran hidup	74,3	Tidak Memenuhi target
4	Angka Kematian Balita	9 per 1.000 kelahiran hidup	11,8 per 1.000 kelahiran hidup	69,0	Tidak Memenuhi target
5	Penurunan angka kesakitan	60%	54,6%	94,0	Tidak Memenuhi target
6	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,50%	0,414%	82,8	Tidak Memenuhi target
7	Capaian UHC	96%	100%	104,2	Melebihi target
8	Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar	95%	100%	105,3	Melebihi target

**Tabel.2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Kota Solok**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Renja PD 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Renja PD 2022		Target Program dan Kegiatan tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstras SKPD s.d tahun 2023	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		Rp.	Realisasi capaian s.d tahun 2023
1	2	3		4		5		6		7
DINAS KESEHATAN			73,393,957,689		69,551,015,032.15	98,8%	94.8%			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			73,393,957,689		69,551,015,032.15	98,8%	94.8%			
URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			73,393,957,689		69,551,015,032.15	98,8%	94.8%			
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100 %	42,161,414,385	100 %	41,152,903,508.00		97.6%			
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	34,556,200	100 %	29,230,800		84.6%			
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perubahan renja PD	1 dok	14,868,000	1 dok	12,780,000	100%				
	Dokumen renja PD	1 dok		1 dok		100%				
	Dokumen renstra PD	1 dok		1 dok		100%				
	Dokumen RKA, RKA-P, DPA dan DPPA	4 dok		4 dok		100%				
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		100 %						
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKPJ PD	1 dok	19,688,200	1 dok	16,450,800	100%	83.6%			
	Dokumen LPPD PD	1 dok		1 dok		100%				
	Evaluasi renja PD (triwulan)	4 dok		4 dok		100%				
	Laporan Kinerja PD	1 dok		1 dok		100%				
	Laporan semesteran	1 lap		1 lap		100%				

		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		100 %							
<b>Kegiatan</b>	<b>: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>35,494,886,857</b>	<b>141 %</b>	<b>35,150,021,756</b>		<b>99.0%</b>				
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji dan tunjangan	14 bulan	35,491,930,057	12 bulan	35,147,617,756	86%	<b>99.0%</b>				
		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13 bulan		12 bulan		92%					
		Insentif pajak dan retribusi	1 tahun		1 tahun		100%					
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Akrual Bulanan	12 bulan	2,956,800	12 bulan	2,404,000	100%	<b>81.3%</b>				
		Laporan semesteran	2 dok		2 dok		100%					
<b>Kegiatan</b>	<b>: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>550,821,200</b>	<b>100 %</b>	<b>507,048,092</b>		<b>92.1%</b>				
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik Dinas Kesehatan	12 bulan	30,055,000	12 bulan	21,036,500	100%	<b>70.0%</b>				
		Komponen instalasi listrik Instalasi Farmasi	12 bulan		12 bulan		100%					
		Komponen instalasi listrik Puskesmas Nan Balimo	12 bulan		12 bulan		100%					
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat/Bahan Tulis Kantor Dinas Kesehatan	12 bulan	84,198,700	12 bulan	71,317,200	100%	<b>84.7%</b>				
		Alat/Bahan Tulis Kantor IFAL	12 bulan		12 bulan		100%					
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat kebersihan dan bahan pembersih untuk Dinas Kesehatan	12 bulan	78,056,500	12 bulan	70,982,500	100%	<b>90.9%</b>				
		Alat kebersihan dan bahan pembersih untuk Puskesmas Nan Balimo dan Rawatan	12 bulan		12 bulan		100%					
		Alat kebersihan dan bahan pembersih untuk Puskesmas Tanah Garam/ Rawatan Ibu dan Anak	12 bulan		12 bulan		100%					
		Alat kebersihan dan bahan pembersih untuk UPTD Instalasi Farmasi	12 bulan		12 bulan		100%					
		Bahan isi ulang tabung gas rawatan ibu anak dan puskesmas Nan Balimo	12 bulan		12 bulan		100%					
		Isi Ulang alat pemadam kebakaran Puskesmas Nan Balimo	12 bulan		12 bulan		100%					
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan Dinas Kesehatan	12 bulan	45,073,000	12 bulan	38,479,000	100%	<b>85.4%</b>				
		Barang cetak dan penggandaan Instalasi Farmasi	12 bulan		12 bulan		100%					
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BBM perjalanan dinas	6005 liter	313,438,000	6,000 liter	305,232,892	100%	<b>97.4%</b>				
		Jumlah makan minum rapat disediakan	350 kotak		350 kotak							
		Jumlah makan minum tamu disediakan	80 kotak		kotak							

		Jumlah susu bubuk disediakan (IFAL)	60 kg		60 kg		583%			
		Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan		12 bulan		100%			
		Koordinasi dan konsultasi luar daerah	13 paket		13 paket		100%			
<b>Kegiatan</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase barang milik daerah diadakan	100 %	<b>27,700,000</b>	%	<b>27,680,000</b>		<b>99.9%</b>		
Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Laptop	2 unit	27,700,000	2 unit	27,680,000		<b>99.9%</b>		
		Printer epson	2 unit		2 unit					
<b>Kegiatan</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>4,902,229,628</b>	<b>100 %</b>	<b>4,659,532,511</b>		<b>95.0%</b>		
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman Surat	12 bulan	3,540,000	12 bulan	3,172,000		<b>89.6%</b>		
		Jumlah Materai 10000	304 lembar		200 lembar					
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Air Dinas Kesehatan, UPTD, Rawatan Ibu dan Anak Labkesda, IFAL dan RSUD	12 bulan	801,789,028	12 bulan	640,264,911	100%	<b>79.9%</b>		
		Jasa Listrik Dinas Kesehatan, Rawatan Ibu dan Anak, UPTD, Labkesda, IFAL dan RSUD	12 bulan		12 bulan		100%			
		Jasa Speedy Dinas Kesehatan, UPTD, Rawatan Ibu dan Anak, Labkesda, IFAL,	12 bulan		12 bulan		100%			
		Jasa Telpn Dinas Kesehatan, Rawatan Ibu dan Anak, UPTD, Labkesda, IFAL dan RSUD	12 bulan		12 bulan		100%			
		Pemasangan Instalasi PDAM baru pustu Gelanggang Bantuak (Pusk Nan Balimo)	1 paket		1 paket					
		Pemasangan pipa Instalasi PDAM Jaringan Air Bersih RSUD	1 paket		1 paket					
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Bendaharawan	24 ob	4,096,900,600	24 ob	4,016,095,600	100%	<b>98.0%</b>		
		Jasa kebersihan kantor (Dinas Kesehatan, UPTD, dan RSUD Kota Solok)	12 bulan		12 bulan		100%			
		Jasa pegawai kontrak (61 orang) 14 bulan	732 ob		610 ob		83%			
		Jasa pegawai sukarela (61 orang) 14 bulan	854 ob		609 ob		71%			
		Jasa Pembantu Bendahara	48 ob		48 ob		100%			
		Jasa Pembantu pengurus/penyimpan barang	12 ob		12 ob		100%			
		Jasa Pembantu pengurus/penyimpan barang puskesmas, labor dan IFAL (6 orang)	72 ob		72 ob		100%			
		Jasa pengurus/penyimpan barang	12 ob		12 ob		100%			
		Jasa pramu kantor (12 orang)	168 ob		168 ob		100%			
		Biaya Outsourcing jasa petugas keamanan RSUD	8 ob		7 ob		88%			

		Biaya Outsourcing jasa petugas kebersihan gedung (Dinas, UPTD dan Sakit Daerah Kota Solok)	1 paket		1 paket		100%				
<b>Kegiatan</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1,151,220,500</b>	<b>100 %</b>	<b>779,390,349</b>	100%	<b>67.7%</b>			
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang dibayarkan pajaknya	124 unit	1,057,885,000	17 unit	746,241,749	14%	<b>70.5%</b>			
		Jumlah lendaraan dinas roda 2 dipelihara	96 unit		19 unit		20%				
		Jumlah kendaraan dinas Roda 4 (1500 cc s/d 2000 cc) yang dipelihara	14 unit		5 unit		36%				
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 (> 2000 cc) dipelihara	14 unit		5 unit		36%				
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan	1 paket		paket						
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan AC dan lift RSUD	1 paket	93,335,500	paket	33,148,600	60%	<b>35.5%</b>			
		Terlaksananya Pemeliharaan peralatan kantor dan RSUD	12 bulan		12 bulan		100%				
		Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor IFAL	12 bulan		12 bulan		100%				
		Cakupan pelayanan ibu sesuai standar (K4)	100 %		82.2 %		82%				
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		87.9 %		88%				
		Cakupan pelayanan kesehatan usia sekolah dasar sesuai standar			96.9						
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi sesuai standar	100 %		94.5 %		95%				
		Cakupan pelayanan kesehatan reproduksi usia 15-59 mendapat skrining sesuai standar	100 %		72.3 %		72%				
		Persentase Ketersediaan obat vaksin dan perbekes	97 %		97 %		100%				
		Persentase masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan	100 %		100.5 %		101%				
		Persentase penanganan KLB < 24 jam	100 %		100 %		100%				
		Persentase penyakit tidak menular yang terdeteksi	100 %		100 %		100%				
		Persentase sarana kesehatan yang terakreditasi	90 %		100 %		111%				
		Tersedianya rumah sakit type C	100 %		%						

PROGRAM	: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan obat vaksin dan perbekes	100 %	29,974,033,804	%	27,216,430,982	90.8%				
		Persentase Masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan	100 %		100.1 %		100%				
		Persentase sarana kesehatan yang terakreditasi	100 %		100.0 %		100%				
Kegiatan	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase pengadaan obat esensial yang sesuai kebutuhan	98 %	7,595,783,450	97.3 %	6,944,550,712	99%	91.4%			
		Pengadaan obat non dasar sesuai kebutuhan	98 %		96.0 %		98%				
		Persentase sarana dan prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan sesuai Standar	98 %		100 %		102%				
Sub Kegiatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (DINAS KESEHATAN)	Terlaksananya Rehab Puskesmas Nan Balimo	1 paket	375,350,000	1 paket	373,747,561	100%	99.6%			
		Tersedianya IPAL	1 unit		1 unit		100%				
Sub Kegiatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Poskeskel yang direhab	1 unit	241,800,500	1 unit	237,569,283	100%	98.3%			
		lanjutan penambahan ruang Puskesmas Tanjung Paku	1 unit		2 unit		200%				
Sub Kegiatan	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya prasarana IPAL (DAK)	1 paket	435,000,000	1 paket	354,449,290	100%	81.5%			
		Tersedianya prasarana Puskesmas (DAK)	1 paket		1 paket		100%				
Sub Kegiatan	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan kesehatan	BOK Penurunan angka kematian ibu dan bayi disediakan	1 paket	2,834,164,000	1 paket	2,590,433,491	95%	91.4%			
		Jumlah Alkes Labkesda disediakan	1 paket		1 paket		100%				
		Jumlah Alkes Puskesmas disediakan	1 paket		1 paket		100%				
		Jumlah Alkes RSUD	1 paket		1 paket		100%				
		Pengadaan Antropometri	14 paket		14 paket		100%				
Sub Kegiatan	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya obat untuk pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas	1 paket	1,820,058,343	1 paket	1,585,175,295.15	90%	87.1%			
		Tersedianya obat untuk pelayanan kesehatan non dasar pada Puskesmas	1 paket		1 paket		100%				
Sub Kegiatan	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Obat-Obatan Lainnya (Bahan Habis Pakai)	1 paket	1,779,995,607	1 paket	1,695,416,992	100%	95.2%			

Sub Kegiatan	Pemeliharaan Prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Prasarana Puskesmas	1 paket	29,415,000	1 paket	28,860,000	100%	98.1%			
Sub Kegiatan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan	1 paket	80,000,000	1 paket	78,898,800		98.6%			
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelidikan Epidemiologi yang dilakukan	91 %	22,219,802,454	100 %	20,191,083,970		90.9%			
		Persentase akses air minum sehat	97 %		98,4 %						
		Persentase anak sekolah yang mendapatkan PMTAS	100 %		100 %						
		Persentase keluarga yang dilakukan intervensi	100 %		100 %						
		Persentase limbah Medis yang ditangani	100 %		100 %						
		Persentase pelayanan ibu hamil sesuai standar (K4)	97 %		88.20 %						
		Persentase Jumlah KK yang dikunjungi	100 %		99.8 %						
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			245,933,100		157,900,000	75%	64.2%			
		Pembelajaran AMP	2 kali		2 kali		100%				
		Pengkajian kasus AMP	3 kali		3 kali		100%				
		Review Kelas Ibu	1 kali		1 kali		100%				
		Terlaksananya Kelas Ibu	38 kali		38 kali		100%				
		Terlaksananya Orientasi SIMATNEO, MPDN dan e-Kohort	1 kali		1 kali		100%				
		Terlaksananya rapat koordinasi/monitoring evaluasi data PWS KIA (MONEV)	5 kali		5 kali		100%				
		Terlaksananya Surveilans Kegiatan Ibu dan Bayi ( Orientasi e-Kohort Untuk Pembina Posyandu	3 kali		3 kali		100%				
		Terlaksananya Surveilans Kesehatan Ibu Dan Bayi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan imunisasi, KIA, Gizi ( Monev )	2 kali		2 kali		100%				
		Terlaksananya Verifikasi pencatatan dan pelaporan komunikasi data, sistem informasi maternal neonatal (MONEV KESGA)	2 kali		2 kali		100%				
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			27,900,000		3,600,000	15%	12.9%			
		Pendampingan kasus Ibu dan Bayi dengan faktor risiko	3 kali		3 kali						

Sub Kegiatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir		43,051,200		35,874,600	85	<b>83.3%</b>			
		Jumlah neonatus yang diperiksa SHK	100 orang		67 orang		67%			
		Terlaksananya Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, neonatus dan bayi dengan faktor resiko	30 kali		30 kali		100%			
		Terlaksananya Orientasi LBH ( Little Baby Handbook )	1 kali		1 kali		100%			
		Terlaksananya Pertemuan koordinasi pemanfaatan sistem rujukan terintegrasi (SISRUTE)	1 kali		1 kali		100%			
		Terlaksananya Supervisi fasilitatif KIA bagi puskesmas dan RS	16 kali		16 kali		100%			
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		178,784,500		161,009,500	95	<b>90.1%</b>			
		Pelaksanaan Bulan timbang	2 kali		2 kali		100%			
		Pembinaan posyandu Balita,Lansia,dan remaja, pos UKK dan Posbindu	12 kali		12 kali		100%			
		Survey SDIDTK	18 kali		8 kali		44%			
		Terlaksananya kelas ibu	29 kelas		29 kelas		100%			
		Upaya Penurunan AKI, AKB (Kegiatan Anak)	3 kali		3 kali		100%			
Sub Kegiatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		193,500,000		186,180,000	100	<b>96.2%</b>			
		Terlaksananya Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) kecacingan	8 kali		8 kali		100%			
		Terlaksananya Pembinaan sekolah sehat (dokter kecil,dan UKS)	2 kali		2 kali		100%			
		Terlaksananya Survey Kesehatan dan berkala Murid Baru Anak Sekolah Dasar,SLTP/SLTA	5 keg		5 keg		100%			
		Terlaksananya Survey Kesehatan Murid BaruAnak Sekolah Dasar	1 keg		1 keg		100%			
		Terlaksananya Sweeping dan Penanggulangan kecacingan Di TK/Paud/SD	2 kali		2 kali		100%			
Sub Kegiatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif		109,438,400		95,227,500	90	<b>87.0%</b>			
		Pemantauan distribusi TTD bagi remaja	1 kali		1 kali		100%			
		Pembentukan posyandu remaja	4 Pusk		4 Pusk		100%			
		Pembinaan KKR	4 Pusk		4 Pusk		100%			
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		133,887,500		124,862,500	95	<b>93.3%</b>			
		Senam lansia dengan instruktur senam	42 Posy		42 Posy		95%			
		Jumlah Posyandu Lansia dapat PMT	42 Posy		42 Posy		100%			

		34 kali		34 kali		100%			
	Deteksi Dini Faktor Risiko PTM di Posbindu PTM dan Posyandu Lansia								
	Terlaksananya Pelatihan caregiver informal oleh Puskesmas	1 kali		1 kali		100%			
	Terlaksananya Skrining Katarak di Posyandu Lansia (krikat)	15 kali		15 kali		100%			
Sub Kegiatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi		23,550,000		23,400,000	100%	<b>99.4%</b>		
	Pelaksanaan posbindu di OPD dan sekolah	446 OH		446 OH					
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		48,100,000		40,750,000	85%	<b>84.7%</b>		
	Pelaksanaan posbindu di kelurahan	920 OH		920 OH					
Sub Kegiatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		2,200,000		2,000,000	95%	<b>90.9%</b>		
	Survey ODGJ petugas	40 OH		40 OH		100%			
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		73,625,000	1,627 OH	71,725,000	100%	<b>97.4%</b>		
	Jumlah penderita TB yang di beri makanan tambahan	2400 OH							
	Jumlah petugas yang di beri makanan tambahan	800 OH		610 OH		76%			
Sub Kegiatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV		24,410,000	1 orang	20,360,000	85%	<b>83.4%</b>		
	Jumlah pemeriksaan CD4	35 orang							
	Terlaksananya peringatan hari AIDS sedunia	1 kali		1 kali		100%			
	Terlaksananya Workshop Program HIV	1 kali		1 kali		100%			
	Penyuluhan kepada Kelompokberesiko (HIV/AIDS , TB dan penyakit Menular	35 OH		35 OH		100%			
	Terlaksananya deteksi Dini Kasus HIV/AIDS,TBC,Hepatitis pada Ibu Hamil dan Kelompok Beresiko	45 OH		12 OH		27%			
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		636,549,450		462,321,600	80%	<b>72.6%</b>		
	Jumlah malation yang disediakan	15 liter		14 liter		93%			
	Tersedianya bubuk Abate	1000 sachet		1,000 sachet		100%			
	Tersedianya honor tim vaksinasi covid	558 ob		495 ob		89%			
	Terlaksananya sosialisasi penjarangan suspek TB pada Fasyankes	1 kali		1 kali		100%			
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Surveilans dan Imunisasi	1 kali		1 kali		100%			

Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balita Gizi Buruk Mendapatkan Rawatan TFC	10 orang	732,462,400	3 orang	651,784,500	90%	<b>89.0%</b>			
		Jumlah anak sekolah mendapat PMT-AS	354 orang		384 orang		108%				
		Jumlah paket yang disediakan untuk potensi KLB masalah gizi	2 paket		1 paket		50%				
		PMT Pemulihan balita gizi kurang dan stunting	84 orang		82 orang		98%				
		PMT Pemulihan ibu hamil KEK	20 orang		18 orang		90%				
		Terlaksananya Kegiatan Orientasi Pemanfaatan/Penggunaan Buku KIA/KMS dan Review PMBA	2 kali		2 kali		100%				
		Terlaksananya Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) di Pos Gizi/Kelas Gizi	4 Pusk		4 Pusk		100%				
		Terlaksananya Pertemuan Desiminasi Hasil Surveilans Gizi kepada LP/LS	1 kali		1 kali		100%				
		Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Program Gizi	1 kali		1 kali		100%				
		Terlaksananya Pertemuan Sinkronisasi Data Pemantauan Pertumbuhan Pengukuran Balita	2 kali		2 kali		100%				
		Tersedia PMT Penyuluhan di Posyandu Balita	12 bulan		12 bulan		100%				
Sub Kejiata	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	GP2SP	50 orang	86,343,100	50 orang	61,299,000	100%	71.0%			
		Pengukuran kebugaran anak sekolah	200 orang		200 orang		100%				
		Pengukuran kebugaran ASN	150 orang		150 orang		100%				
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tersedianya Dokumen EHRA	1 dok	337,489,600	1 dok	256,691,015	100%	<b>76.1%</b>			
		Pengelolaan limbah medis	2000 kg		2,480 kg		124%				
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	19,835,000	50 orang	18,864,000	100%	<b>95.1%</b>			
		Terlaksananya pembinaan hatra yankestrad	10 kali		10 kali		100%				
		Terlaksananya pembinaan KK Bina Toga dan Akupresure	10 kali		10 kali		100%				
Sub Kegiatan	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	BOK (DAK Non Fisik)	1 paket	1,430,367,275	1 paket	748,221,100	60%	<b>52.3%</b>			
		Jumlah pertemuan Tim kesehatan haji	4 kali		4 kali		100%				
		Jumlah peserta Pertemuan calon jemaah haji	140 orang		114 orang		81%				
		Monev PIS-PK	4 kali		4 kali		100%				
		Operasional P3K di luar gedung	373 orang		373 orang		100%				
		Peserta Kegiatan Tim Building PSC 119/ Service Exellent	120 orang		- orang		0%				

		Rujukan referal okupasi terapi	24 kali		24 kali		100%				
		Rujukan referal Terapi wicara	24 kali		24 kali						
Sub Kegiatan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jasa kader posbindu dlm pelayanan posbindu	1224 OB	354,961,600	1,224 OB	286,445,000	85%	80.7%			
		Terlaksananya pemeriksaan CDA bagi penderita HIV	3 orang		- orang		0%				
Sub Kegiatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya pertemuan penguatan SPM program kesehatan jiwa	1 kali		1 kali		100%				
		luran Jaminan Kesehatan jasa Pelayanan (4%)	1 tahun	13,715,594,800	1 tahun	13,426,077,215	100%	97.9%			
		Jasa Pelayanan Non Kapitasi	1 paket		1 paket		100%				
		Jumlah peserta verifikasi dan validasi	60 orang		60 orang		100%				
		Jumlah presmi asuransi JKSS	15329 orang		##### orang		98%				
		Premi asuransi jamkesko	15762 orang		##### orang		106%				
		Terlaksananya monev JKN	4 kali		4 kali						
		Tersedia dana pendamping untuk jumlah masyarakat miskin yang ada jaminan kesehatan menerima bantuan biaya lanjutan	12 bulan		12 bulan						
Sub Kegiatan	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah bahan labor kesehatan disediakan	9 jenis	3,590,827,529	9 jenis	3,309,061,440	100%	92.2%			
		Jumlah laporan survey	7 lap		- lap		0%				
		Jumlah Reagen Laboratorium disediakan	54 jenis		54 jenis		100%				
		Laptop	0 unit		- unit		#DIV/0!				
		Operasional Laboratorium	12 bulan		12 bulan		100%				
		Operasional PSC 199 Smash Care	12 bulan		12 bulan		100%				
		Operasional puskesmas rawat inap	12 bulan		12 bulan		100%				
		Piket Posko PSC 119 Smash Care	12 bulan		12 bulan		100%				
		Piket Puskesmas Rawat Inap	12 bulan		12 bulan		100%				
		Printer	0 unit		- unit		#DIV/0!				
		Terlaksananya penilaian pematapan mutu eksternal Labkesda	2 kali		2 kali		100%				
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pembinaan puskesmas pasca akreditasi	36 dok	210,992,000	dok	47,430,000	60%	22.5%			
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan survei Re Akreditasi	2 pusk		pusk		#VALUE!				
		Pendampingan Pasca Akreditasi	4 pusk		pusk		#VALUE!				
		Workshop Peningkatan kapasitas tatakelola manajemen mutu	80 orang		80 orang		100%				
Kegiatan	: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah pertemuan evaluasi data	12 kali	88,947,900	12 kali	27,915,000	100%	31.4%			

Sub Kegiatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Pertemuan Evaluasi Data	12 kali	57,533,700	12 kali	9,034,000	60%	15.7%			
Sub Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya rapat	12 kali	21,914,200	12 kali	15,400,000	90%	70.3%			
Sub Kegiatan	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan laptop	13 paket	9,500,000	13 paket	3,481,000	100%	36.6%			
<b>Kegiatan</b>	<b>: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota</b>	<b>Jumlah Puskesmas BLUD</b>	<b>4 pusk</b>	<b>69,500,000</b>	<b>2 pusk</b>	<b>52,881,300</b>	<b>50%</b>	<b>76.1%</b>			
Sub Kegiatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Monev Pelayanan Kesehatan	2 kali	69,500,000	2 kali	52,881,300	80%	76.1%			
		Pertemuan persiapan BLUD	3 kali		3 kali		100%				
<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)</b>	<b>20 orang</b>	<b>420,727,500</b>	<b>orang</b>	<b>392,553,642</b>	<b>100.0%</b>	<b>93.3%</b>			
		<b>Mapping dan Dokumen Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan (Rembut)</b>	<b>2 dokumen</b>		<b>2 dokumen</b>		<b>100%</b>				
		<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Praktik Tenaga Kesehatan</b>	<b>100 %</b>		<b>53.2 %</b>						
		<b>Persentase Tenaga Kesehatan Punya Izin Praktik</b>	<b>100 %</b>		<b>56.4 %</b>						
<b>Kegiatan</b>	<b>: Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</b>	<b>95 %</b>	<b>11,999,500</b>	<b>53.2 %</b>	<b>11,295,400</b>	<b>100.0%</b>	<b>94.1%</b>			
Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Monitoring/ Survey Praktek tenaga Kesehatan	64 kali	11,999,500	64 kali	11,295,400	100%	94.1%			
		Rapat Koordinasi perizinan tenaga kesehatan	3 kali		3 kali		100%				
		Survey perizinan nakes baru (bindawas)	20 kali		20 kali		100%				
		Tersedianya data dan pelaporan Tenaga kesehatan yang mempunyai izin	12 bulan		12 bulan		100%				
<b>Kegiatan</b>	<b>: Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>			<b>249,600,000</b>		<b>232,999,000</b>		<b>93.3%</b>			
Sub Kegiatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pembayaran jasa tenaga BOK	12 bulan	249,600,000	12 bulan	232,999,000	100%	93.3%			
<b>Kegiatan</b>	<b>: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Diklat untuk Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan</b>	<b>5 paket</b>	<b>159,128,000</b>	<b>5 paket</b>	<b>148,259,242</b>	<b>100%</b>	<b>93.2%</b>			

		Tersedianya data dan pelaporan uji kompetensi	2 dok		2 dok		100%				
Sub Kegiatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kontribusi Bintek dan pelatihannya	5 paket	159,128,000	5 paket	148,259,242	100%	93.2%			
		Meningkatnya kompetensi SDM Kesehatan	5 orang		5 orang		100%				
<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase Perizinan Apotik, Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berjalan sesuai ketentuan</b>	<b>100 %</b>	<b>8,912,000</b>	<b>100 %</b>	<b>8,462,000</b>		<b>95.0%</b>			
<b>Kegiatan</b>	<b>: Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Persentase Perizinan Apotik, Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berjalan sesuai Ketentuan</b>	<b>100 %</b>	<b>8,912,000</b>	<b>100 %</b>	<b>8,462,000</b>		<b>95.0%</b>			
Sub Kegiatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana kesehatan dilaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pelayanan kefarmasian sesuai standar: Apotik	33 unit	8,912,000	33 unit	8,462,000	100%	95.0%			
		Jumlah sarana kesehatan dilaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pelayanan kefarmasian sesuai standar: Poskeskel	13 unit		13 unit		100%				
		Jumlah sarana kesehatan dilaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pelayanan kefarmasian sesuai standar: Puskesmas	4 unit		4 unit		100%				
		Jumlah sarana kesehatan dilaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pelayanan kefarmasian sesuai standar: Pustu	17 unit		17 unit		100%				
		Jumlah sarana kesehatan dilaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pelayanan kefarmasian sesuai standar: Toko Obat Tradisional	5 unit		5 unit		100%				
		Jumlah sarana kesehatan dilaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pelayanan kefarmasian sesuai standar: Toko Optikal	8 unit		8 unit		100%				
		Pembinaan Pelayanan farmasi pada Apotik, Apotik rakyat, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5 unit		5 unit		100%				

PROGRAM	: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	kebijakan PHBS dan Germas	2 dok	828,870,000	- dok	780,664,900	100%	94.2%				
		Persentase Penjaringan anak sekolah	100 %		80 %		80%					
		persentase Posyandu Aktif	60 %		100 %							
		Persentase UKBM yang dibina	2 dok		2 dok		100%					
Kegiatan	: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Implementasi germas	2 dok	561,150,000	- dok	560,105,800	100%	99.8%				
		jasa kader	100 %		100 %		100%					
		lomba Posyandu berprestasi	1 kali		1 kali		100%					
		persentase posyandu terbina	100 %		100 %		100%					
Sub Kegiatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Monev Pokjanal Kota	2 kali	561,150,000	2 kali	560,105,800	100%	99.8%				
		pembayaran jasa kader posyandu balita	428 orang		385 orang		90%					
		pembayaran jasa kader posyandu lansia	129 orang		120 orang		93%					
		Penilaian Posyandu balita Tk. Kota	2 kali		2 kali		100%					
		Lomba kader posyandu terbaik tingkat kota	1 orang		1 orang		100%					
		Rapat persiapan pelaksanaan lomba Posyandu	1 kali		1 kali		100%					
		Pelaksanaan rapat LS/LP	1 kali		1 kali		100%					
Kegiatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Media informasi kesehatan	8 unit	233,500,000	8 unit	189,059,100	100%	81.0%				
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah implementasi germas di semua tatanan	2 keg	233,500,000	2 keg	189,059,100	90%	81.0%				
		Jumlah kader screening diberi reward berhenti merokok	6 org		- org		0%					
		Jumlah leaflet dicetak	9 rim		9 rim		100%					
		Jumlah masyarakat diberi reward berhenti merokok	6 org		6 org		100%					
		Jumlah Pelaksanaan Germas di Puskesmas	2 ke		2 ke		100%					
		Jumlah Pelaksanaan Germas Tingkat Kota	1 kali		1 kali		100%					
		Jumlah Penayangan Radio Spot	200 spot		200 spot		100%					
		Jumlah Pertemuan Forum Germas	2 ke		2 ke		100%					
		Jumlah spanduk/baliho dicetak	1000 m		1,000 m		100%					
		Jumlah stiker indoor dicetak	60 m		14 m		23%					
		Jumlah stiker oneway dicetak	50 m		50 m		99%					
		Jumlah stiker outdoor dicetak	50 m		21 m		41%					
		Jumlah X Barner dicetak	25 buah		25 buah		100%					

Kegiatan	: Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan siaga aktif	13 kel	34,220,000	13 kel	31,500,000	95.0%	92.1%			
		Persentase dokter kecil terbina	100 %		94.1 %		94.1				
		Persentase Poskestren terbina	100 %		100.0 %		100.0				
		Persentase SBH terbina	100 %		100.0 %		100.0				
		Persentase UKS terbina	100 %		90.9 %		90.9				
Sub Kegiatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bakti SBH	1 kali	34,220,000	1 kali	31,500,000	95.0%	92.1%			
		Pembinaan SBH	10 kali		10 kali		100%				
		Persami	1 kali		1 kali		100%				

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Solok dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

Dari data capaian Indikator Sasaran / program yang masuk dalam indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2022 di Kota Solok adalah sebagai berikut :

### 1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu (AKI) adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, nifas atau pengelolaannya. di setiap 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2018). Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan upaya kesehatan ibu dan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu (AKI) menggambarkan risiko yang dihadapi bumil selama kehamilan dan melahirkan. AKI dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, ketersediaan dan akses fasilitas pelayanan kesehatan.

Kematian ibu dikota Solok pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Walaupun telah mengalami penurunan tetapi masih diatas target yang ditetapkan. Penyebab kematian ibu di kota Solok tahun 2022 adalah penyakit TB paru dan adanya indikasi komplikasi pada kehamilan, meskipun pelayanan dan sistem rujukan sudah dilakukan secara maksimal, namun kondisi ibu dengan 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak) sangat berpengaruh terhadap kondisi ibu hamil. Agar kematian Ibu dapat ditekan seminimal mungkin perlu upaya dengan meningkatkan kualitas AnteNatal Care (ANC) dan Post Natal Care (PNC), meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor terkait dan melakukan upaya penguatan pelayanan kesehatan ibu, pemantauan wilayah setempat oleh Pembina wilayah serta koordinasi dengan lintas program terkait penyakit penyerta yang diderita oleh ibu sehingga kondisi ibu dapat dipantau dengan baik.

### 2. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan jumlah Kematian bayi suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang sama x 1000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan di suatu wilayah yang menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan, kapasitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat, kualitas kesehatan lingkungan, sosial dan budaya serta hambatan dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan.

Beberapa faktor berkontribusi pada kematian bayi seperti tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu, penyakit/kondisi ibu selama kehamilan, pertolongan persalinan,

penanganan kasus gawat darurat maternal-neonatal, kondisi lingkungan, infrastruktur politik, pengobatan/penanganan kasus neonatal komplikasi, sanitasi dan akses air bersih, status imunisasi, pembiayaan dan langkah-langkah kesehatan publik.

### **3. Penurunan Angka Kesakitan**

Penurunan angka kesakitan adalah persentase kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular (Diabetes Melitus, Hipertensi, ODGJ, HIV, TB) dalam periode tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama. Capaian tahun 2022 sebesar 54,6% dari target 60%. Masih belum tercapainya target penurunan angka kesakitan disebabkan oleh pandemi covid 19 dengan pembatasan kegiatan sehingga penjangkaran dan pelayanan tidak dapat terlaksana secara optimal selain itu kegiatan-kegiatan diarahkan sebagian besar untuk pencegahan dan penanggulangan covid.

### **4. Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat**

Adalah Jumlah keluarga yang memenuhi 12 Indikator Keluarga Sehat. Capaian tahun 2022 sebesar 0,414 dari target yang ditetapkan 0,5. Capaian ini juga belum memenuhi target yang ditetapkan. Penyebabnya adalah masih banyak penderita hipertensi, TB yang belum menjalani pengobatan secara rutin serta masih ada penderita penyakit jiwa di dalam keluarga yang tidak mendapatkan perawatan sesuai standar

### **5. Capaian UHC (Universal High Coverage)**

UHC (*Universal Health Coverage*) adalah program nasional dalam jaminan kesehatan untuk masyarakat seluruh Indonesia. Dalam hal ini capaian UHC adalah Masyarakat yang mendapat perlindungan kesehatan dan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap masyarakat yang telah membayar iuran atau iuran dibayarkan oleh pemerintah. Tahun 2022 semua masyarakat kota Solok telah mendapatkan jaminan kesehatan dengan baik

### **6. Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai Standar**

Target untuk indikator ini adalah 95% dengan realisasi 100%, artinya semua fasilitas kesehatan yang ada di kota Solok telah sesuai standar yang ditetapkan baik dari segi lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, perizinan/registrasi dan penyelenggaraan. Standar yang menjadi acuan dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas

### **7. Nilai evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan Kota Solok**

Berdasarkan hasil penilaian, diketahui bahwa nilai LAKIP Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun 2020 bernilai B dari target BB yang ditetapkan.

**Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Solok**

NO	Indikator *)	SPM	IKK	Target (Tahun)					Realisasi Capaian (Tahun)				Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
1	AKI		√	75	75	75	75	75	70,0	75,0	225	146,9	145,0	120,0	
2	AKB		√	7	6	6	6	6	4,9	5,09	12	8,8	8,0	7,0	
3	AKABA		√	9	9	8	8	8	-	-	-	11,8	11,0	10,5	
3	Penurunan angka kesakitan		√	60	65	70	75	80	NA	34,46	38,26	54,6	60	65	
4	Indeks Keluarga Sehat		√	0,500	0,600	0,700	0,800	0,800	0,339	0,332	0,399	0,414	0,450	0,500	
5	Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar kesehatan		√	95	95	95	95	95	97,25%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Capaian UHC		√	96	97	98	99	100	95,21%	96,29%	96,75%	100%	100%	100%	
7	Nilai evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan Kota Solok		√	BB	BB	A	A	A	BB	BB	B		BB	BB	

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK

Dalam penetapan kebijakan Dinas Kesehatan perlu didukung oleh data dan mempertimbangkan permasalahan daerah yang memang pantas untuk diangkat kepermukaan untuk dibicarakan dan dicarikan solusi untuk mengatasinya. Permasalahan-permasalahan yang mendasar ini dirangkum kedalam isu strategis yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap penetapan kebijakan baik jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Isu-isu strategis yang perlu dipertimbangkan adalah :

- a. Posisi strategis Kota Solok selain memberi dampak positif juga memberi dampak negatif berupa mobilisasi penduduk yang tinggi dan perubahan gaya hidup sehingga masyarakat Kota Solok rentan terhadap perkembangnya penyakit menular seperti DBD, TBC, Malaria, HIV/AIDS dan Penyakit tidak menular seperti Kanker, Hipertensi, Diabetes melitus, gangguan jiwa kesehatan olahraga dll serta permasalahan kesehatan ibu, bayi balita, remaja dan lansia.
- b. Posisi Kota Solok yang terletak di persimpangan jalan utama beberapa daerah di dalam Provinsi Sumatera Barat juga berpotensi terhadap peningkatan angka kemiskinan yang berdampak pada munculnya permasalahan gizi masyarakat berupa balita gizi buruk dan ibu hamil kurang energi kalori serta ketersediaan jaminan pembiayaan kesehatan.
- c. Kualitas pelayanan kesehatan salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas. Untuk itu perlu dilakukan pemerataan kompetensi yang dimiliki petugas kesehatan di semua puskesmas.
- d. Masyarakat Kota Solok dilayani oleh RS M.Natsir untuk pelayanan rujukan. RS M. Natsir ini merupakan RS Tipe B yang berfungsi sebagai rujukan dari RS beberapa kab/Kota. Kota Solok sendiri belum mempunyai RS. Untuk itu diperlukan RS Kota Solok tipe C dalam melayani rujukan sebelum pasien dirujuk ke RS M. Natsir.
- e. Peningkatan mutu pelayanan tidak hanya dipenuhi oleh SDM saja, tetapi diperlukan regulasi dan manajemen pelayanan kesehatan yang berkualitas, maka puskesmas perlu distandarisasi dalam hal pelayanan melalui puskesmas terakreditasi.
- f. Untuk mencapai penyehatan lingkungan, dengan dicanangkannya target *universal access* air minum dan sanitasi oleh pemerintah pusat, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya cakupan layanan air bersih dan sanitasi, sehingga memerlukan upaya yang lebih dalam rangka mencapai target dimaksud melalui pembangunan fisik sanitasi dan perubahan perilaku masyarakat.
- g. Keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya melalui peningkatan jenis pelayanan tetapi ditunjang oleh perlunya ketersediaan yang berkelanjutan dan pemerataan

distribusi terhadap sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, obat- obatan, alat farmasi, vaksin dan sarana prasarana laboratorium kesehatan.

- h. Relatif rendahnya partisipasi masyarakat, dilihat dari swadaya masyarakat dan swasta serta organisasi masyarakat terhadap program kesehatan sehingga kemandirian masyarakat dalam perilaku hidup sehat belum optimal.
- i. Pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelayanan kesehatan diperlukan untuk menilai dampak pelayanan kesehatan yang telah dilakukan
- j. Kebijakan strategis yang tak kalah krusialnya adalah anggaran (budgeting). Anggaran merupakan sumber daya yang sangat penting dalam rangka memperkuat seluruh kebijakan yang telah diambil.

Beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan, antara lain :

1. Misi pembangunan Nasional bidang kesehatan, yaitu “Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera” dan Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Dengan arah kebijakan :
  - a. Penguatan pelayanan kesehatan primer (*primary health care*) di Puskesmas
  - b. Penerapan pendekatan berkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (*continuum of care*)
  - c. Intervensi berbasis resiko kesehatan (*health risk*)
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, mengamanatkan puskesmas yang ada harus terakreditasi dengan masa berlaku setiap 3 (tiga) tahun. Semua Puskesmas yang ada di Kota Solok telah terakreditasi. Akan tetapi masa berlakunya status terakreditasi hanya selama 3 tahun dan harus menjalani reakreditasi atau penilaian lagi setiap 3 tahun sekali. Pada tahun 2019, terdapat 2 (dua) puskesmas yang harus melaksanakan re-akreditasi yaitu Puskesmas Tanah Garam dan Puskesmas Tanjung Paku. Sampai tahun 2022 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena Pandemi Covid-19
3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Solok yang akan mulai operasional tahun 2024.
4. Undang undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (pasal 18 ayat 23), Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, mengharuskan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pelayanan Dasar pada

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pasal 4 mewajibkan pemerintah daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah atau RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
6. Masih terdapat banyak data dan informasi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, yang tidak tersedia atau belum dilaksanakan. Juga masih terdapat beberapa capaian indikator SDGs yang belum sesuai harapan/standar.
7. Masalah kesehatan *triple burden*, yaitu masih tingginya penyakit infeksi, meningkatnya penyakit tidak menular dan penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi muncul kembali.
8. Di era jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan anggaran banyak terserap untuk membiayai penyakit katastropik, yaitu PJK, Gagal Ginjal Kronik, Kanker, dan Stroke. Terlebih, pelayanan kesehatan peserta JKN masih didominasi pada pembiayaan kesehatan di tingkat lanjutan dibandingkan di tingkat dasar.

Sedangkan peluang dalam upaya peningkatan pelayanan antara lain :

1. Misi pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Kota terpilih periode 2022-2024 dan tertuang dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2022-2026, yang mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Solok, yaitu “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial”, dengan tujuan “Meningkatnya kualitas hidup masyarakat”
2. Kewenangan urusan konkuren di Bidang Kesehatan daerah kabupaten/ Kota sebagaimana amanat Undang undang Nomor 23 Tahun :
  - a. Upaya Kesehatan dengan kewenangan, yaitu :
    - 1) Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah

- kabupaten/kota
- 2) Pengelolaan UKM Daerah kabupaten /kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten /kota
  - 3) Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan kewenangan, yaitu:
- 1) Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan
  - 2) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota
- c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, yaitu:
- 1) Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal
  - 2) Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).
  - 3) Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga
  - 4) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
  - 5) Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yaitu :
- 1) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/ kota.
3. Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan yang memadai, sebagaimana amanat Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 : ayat (2) : Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji.
  4. Masih adanya alokasi anggaran DAK Fisik dan Non Fisik Bidang Kesehatan untuk Kota Solok setiap tahunnya, untuk memperkuat dukungan anggaran pada kegiatan Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan terutama di Puskesmas.
  5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031, telah mengatur pengembangan kawasan budidaya Kota Solok untuk pengembangan Zona pelayanan umum, melalui tahapan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan kesehatan yang berlokasi di pusat kota. Pengembangan kesehatan melalui

kegiatan disetiap bagian wilayah perkotaan (BWP) yang meliputi :

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhierarki
- b. Mengembangkan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialisik

## **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Dalam melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dilakukan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Solok dan juga tingkat kinerja Dinas Kesehatan. Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Kota Solok berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Kota Solok berupa rancangan awal RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan dimasyarakat. Selanjutnya perlu disadari bahwa paradigma baru pengelolaan keuangan Negara menuntut upaya perubahan yang mendasar dalam pendekatan penganggaran. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Penting juga untuk memastikan bahwa pilihan program sebagai instrumen kebijakan benar-benar merupakan alternatif terbaik yang mencakup kegiatan-kegiatan yang mencerminkan alternatif pendekatan paling efisien untuk menghasilkan keluaran dan efektif dalam mendukung pencapaian rencana program. Dengan demikian antara kebijakan, program/kegiatan dan sub kegiatan harus merupakan sebuah rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan Konseptual.

**TABEL 2.4**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK**

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
				79,986,086,064					84,675,200,000	
<b>AKI</b>			75		<b>AKI</b>			75		
AKB			6		AKB			6		
AKABA			8		AKABA			8		
Capaian penurunan Angka Kesakitan			65 %		Capaian penurunan Angka Kesakitan			65 %		
Indeks Keluarga Sehat			0.6		Indeks Keluarga Sehat			0.6		
Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar kesehatan			95 %		Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar kesehatan			95 %		
UHC			97 %		UHC			97 %		
Nilai evaluasi LAKIP dinas kesehatan Kota Solok			BB		Nilai evaluasi LAKIP dinas kesehatan Kota Solok			BB		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		-	100 %		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		-	100 %		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		-	100 %	32,500,000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		-	100 %	36,000,000	
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Solok	-	2 dok	17,000,000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Solok	-	2 dok	19,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	7 laporan	15,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	7 laporan	17,000,000	
<b>Administrasi Keuangan PD</b>				36,708,808,770	<b>Administrasi Keuangan PD</b>				37,012,000,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Solok	-	330 Or/bln	36,700,000,570	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Solok	-	330 Or/bln	37,000,000,000	
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		-	4 laporan	8,808,200	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		-	4 laporan	12,000,000	

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah</b>	100 %	<b>444,946,300</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah</b>	100 %	<b>518,000,000</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkes	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	33,801,200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkes	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	35,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52,085,400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	120,000,000			- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	125,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinkes	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	35,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinkes	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	43,536,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	204,059,700	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	257,597,500	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>- Cakupan penyediaan barang milik daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>155,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>- Cakupan penyediaan barang milik daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>190,000,000</b>	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkes	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	155,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkes	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	190,000,000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>- Cakupan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>5,802,220,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>- Cakupan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>6,002,500,000</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkes	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2,220,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkes	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2,500,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkes	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	800,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkes	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	900,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkes	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28 Laporan	5,000,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkes	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28 Laporan	5,100,000,000	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	1,250,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	1,290,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkes	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	124 Unit	900,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkes	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	124 Unit	910,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKK	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	260,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKK	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	280,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkes	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	90,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkes	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	100,000,000	
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		- Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %	<b>35,148,735,994</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		- Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %	<b>39,134,000,000</b>	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		- Jumlah pengadaan obat essensial yang sesuai kebutuhan	100 %	<b>17,507,129,094</b>	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		- Jumlah pengadaan obat essensial yang sesuai kebutuhan	100 %	<b>20,710,000,000</b>	
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	IFAL	- Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 unit	1,640,000,000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	IFAL	- Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 unit	1,740,000,000	
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas dan Labkesda	- Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang MediFasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 unit	14,937,129,094	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas dan Labkesda	- Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang MediFasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 unit	18,000,000,000	
Pengadaan Obat, Vaksin	Puskesmas	- Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 paket	340,000,000	Pengadaan Obat, Vaksin	Puskesmas	- Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 paket	370,000,000	
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Puskesmas	- Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 paket	560,000,000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Puskesmas	- Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 paket	600,000,000	
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		- Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang MediFasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 unit	30,000,000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		- Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang MediFasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 unit	0	

<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		- Penanganan Bumil, Bulin, bufas dengan Komplikasi	90 %	<b>17,635,006,900</b>	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		- Penanganan Bumil, Bulin, bufas dengan Komplikasi	90 %	<b>18,416,000,000</b>	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Solok	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1582 dok	9,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Solok	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1582 dok	10,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		- Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1510 orang	28,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		- Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1510 orang	33,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		- Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1438 orang	28,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		- Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1438 orang	33,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		- Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7037 orang	5,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		- Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7037 orang	5,500,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		- Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12320 orang	15,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		- Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12320 orang	15,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		- Jumlah Penduduk UsiProduktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52859 orang	11,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		- Jumlah Penduduk UsiProduktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52859 orang	12,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		- Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5696 orang	85,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		- Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5696 orang	90,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		- Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13151 Orang	9,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		- Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13151 Orang	11,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		- Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	608 Orang	10,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		- Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	608 Orang	11,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	159 Orang	40,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	159 Orang	44,000,000	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2372 orang	9,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2372 orang	11,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	41 Dok	75,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	41 Dok	88,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	2 Dok	6,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	2 Dok	6,600,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14 Dok	350,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14 Dok	650,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 Dok	4,300,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 Dok	4,500,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16 Dok	87,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16 Dok	95,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	21 Dok	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	21 Dok	22,000,000
Pengelolaan surveilans kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	56 Dok	4,012,000	Pengelolaan surveilans kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	56 Dok	4,400,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	696 Orang	10,000,000			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	696 Orang	11,000,000

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	8 Dok	138,000,000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	8 Dok	150,000,000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	41 Dok	115,000,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	41 Dok	122,000,000	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17 Dok	13,700,000,000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17 Dok	14,000,000,000	
Penyelenggaraan Kota Sehat	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	11 Dok	60,000,000	Penyelenggaraan Kota Sehat	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	11 Dok	66,000,000	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	27 Dok	950,000,000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	27 Dok	1,000,000,000	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 unit	38,194,900	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 unit	43,000,000	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	1,790,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	1,850,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	19315 keluarga	8,500,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	19315 keluarga	10,000,000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2859 Orang	30,000,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2859 Orang	33,000,000	
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/ Kota</b>				<b>6,600,000</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/ Kota</b>				<b>8,000,000</b>	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	-	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan,	1 unit	1,600,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	-	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 unit	2,000,000	

		Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya					yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	4 unit	5,000,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	4 unit	6,000,000	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>				<b>250,500,000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>				<b>278,000,000</b>	
<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>				<b>5,500,000</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>				<b>8,000,000</b>	
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dok	3,500,000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dok	5,000,000	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	286 orang	2,000,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	286 orang	3,000,000	
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>245,000,000</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>270,000,000</b>	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 orang	245,000,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 orang	270,000,000	
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>				<b>76,800,000</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>				<b>86,200,000</b>	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1,300,000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				2,000,000	

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	Jumlah Dokumen HasiPengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 dok	1,300,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	Jumlah Dokumen HasiPengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 dok	2,000,000
<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga</b>				<b>1,000,000</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga</b>				<b>1,700,000</b>
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	-	jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	51 dok	1,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	-	jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	51 dok	1,700,000
<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>				<b>70,000,000</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>				<b>77,000,000</b>
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	Jumlah Dokumen HasiPengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	18 dok	70,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	Jumlah Dokumen HasiPengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	18 dok	77,000,000

<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>				<b>4,500,000</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>				<b>5,500,000</b>	
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah Dokumen HasiPengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	52 Dok	4,500,000	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah Dokumen HasiPengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	52 Dok	4,500,000	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>				<b>116,575,000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>				<b>128,500,000</b>	
<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>1,575,000</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>2,000,000</b>	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat -	4 dok	1,575,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat -	4 dok	2,000,000	
<b>Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>100,000,000</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>110,000,000</b>	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen HasiPenyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat -	5 dok	100,000,000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen HasiPenyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat -	5 dok	110,000,000	
<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>15,000,000</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>16,500,000</b>	
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen HasiBimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) -	10 dok	15,000,000	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen HasiBimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) -	10 dok	16,500,000	



## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

### **3.1 . TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

SPM bidang kesehatan mencakup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah provinsi terdiri atas:

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Jenis pelayanan dasar dan penerimanya di Pemerintah Kabupaten/Kota:

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4) Pelayanan kesehatan balita;
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Selain itu, perumusan kegiatan bidang kesehatan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 antara lain:

- 1) Peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- 2) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (selain yang ditetapkan melalui SPM):
  - a. Penyakit Tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)
  - b. Penurunan prevalensi merokok pada usia  $\leq 18$  tahun
  - c. Penurunan prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 +
- 3) Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- 4) Promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Dinas Kesehatan sebagai unit kerja Pemerintahan Daerah Kota Solok Tahun 2024 menetapkan arah kebijakan pembangunan yang mengacu pada kebijakan nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kota Solok sebagai berikut :

1. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang budaya hidup bersih dan sehat bagi masyarakat.
2. Memberikan imunisasi bagi balita dan ibu hamil.
3. Memaksimalkan peranan Puskesmas, Posyandu dan Pos Kesehatan Kelurahan dan memberdayakan kesehatan masyarakat.
4. Melakukan upaya-upaya peningkatan gizi masyarakat.
5. Melakukan pencegahan penyakit menular melalui peningkatan pemahaman masyarakat.
6. Memberikan pengobatan gratis bagi semua warga Kota di tingkat Pelayanan Puskesmas.
7. Menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas di semua Puskesmas, Pustu dan Pos pelayanan kelurahan.
8. Meningkatkan kualitas SDM bagi petugas pelayanan kesehatan masyarakat.
9. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN**

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kota “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, sehat, kreatif dan berdaya saing” dan untuk mencapai visi misi Dinas Kesehatan, dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan adalah Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator tujuan meningkatkan Angka Usia harapan Hidup (UHH).

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesehatan keluarga  
dengan indikator sasaran:
  - a. Angka Kematian Ibu (AKI)
  - b. Angka Kematian Bayi (AKB)
  - c. Angka Kematian Balita (AKABA)
- 2) Menurunkan Angka Kesakitan  
dengan indikator sasaran:
  - a. Penurunan angka kesakitan

- b. Indeks Keluarga Sehat
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan indikator sasaran:
  - a. Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar kesehatan
  - b. Capaian UHC
- 4) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja dengan indikator sasaran: Nilai evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan Kota Solok.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran dan Target Kinerja**

NO	INDIKATOR KINERJA/TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2020	TARGET CAPAIAN (TAHUN)						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	74,91	75	75	75	75	75	75	75
2	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	5,9	7	7	6	6	6	6	6
3	Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	6,74	9	9	8	8	8	8	8
4	Universal Health Coverage (UHC)	%	95,78	95	96	97	98	99	100	100
5	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,388	0,400	0,500	0,600	0,700	0,800	0,800	0,800
6	Prevalensi Balita Wasting	%	4,12	4,12	4,12	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9
7	Persentase penurunan Angka Kesakitan	%	34,46	50	60	65	70	75	80	80
8	Rasio dokter per satuan penduduk	Ratio	1:1113	1:1113	1:1113	1:1113	1:1113	1:1113	1:1113	1:1113
9	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Ratio	1:200	1:200	1:200	1:200	1:200	1:200	1:200	1:200
10	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	61,54	80	80	80	80	80	80	80
11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	90,80	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan	%	87,04	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	90,50	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	90,50	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Pelayanan Kesehatan balita	%	61,39	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	%	3,89	100	100	100	100	100	100	100
18	Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	%	28,83	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA/TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2020	TARGET CAPAIAN (TAHUN)						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
19	Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia lansia	%	76,36	82	83	83	84	84	85	85
20	Persentase Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	%	10,09	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	66,71	100	100	100	100	100	100	100
22	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	91,28	100	100	100	100	100	100	100
23	Persentase Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	68,60	90	95	95	95	95	95	95
24	Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodeficiency virus)	%	65,95	100	100	100	100	100	100	100
25	Bed Occupation Rate (BOR) RSUD Kota Solok	%	0	0	0	20	20	22	25	25

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2024 telah berpedoman pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019 baik klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Faktor-faktor yang mendasari direncanakannya program dan kegiatan dalam upaya mengakomodir pencapaian visi misi kepala daerah khususnya misi 3 yaitu Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial selain itu juga mempertimbangkan pencapaian SDGs khususnya goal 2,3,5 dan 6 yakni mengakhiri kelaparan, meningkatkan status gizi, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia, menjamin kesetaraan gender, pemberdayaan wanita serta menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Selain itu juga memperhatikan SPM bidang Kesehatan yang harus dicapai setiap tahunnya. Secara rinci rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 sebagai berikut :

#### **4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**

##### **1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

##### **3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD

##### **4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

##### **5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**4.2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

**1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**

- a. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- c. Pengadaan Obat, Vaksin
- d. Pengadaan Bahan Habis Pakai
- e. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

**2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
- l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
- n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

- o. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- p. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- q. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
- r. Pengelolaan surveilans kesehatan
- s. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- t. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- u. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- v. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- w. Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat
- x. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- y. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- z. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- aa. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
- bb. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis

### **3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/ Kota**

- a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
- b. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

#### **4.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

- 1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM Kabupaten/Kota**
  - a. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan SDM Kesehatan
  - b. Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar
- 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### **4.4 Program Kesiediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan makanan Minuman**

- 1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**

- a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga**
  - a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
- 3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**
  - a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- 4. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**
  - a. Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

#### **4.5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

- 1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**
  - a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**
  - a. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- 3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan semaksimalnya ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Solok. Pada prinsipnya upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Namun di beberapa kegiatan juga berfokus pada masyarakat miskin/kurang mampu terutama dalam hal pemenuhan gizi balita/ibu hamil kurang gizi, jaminan kesehatan melalui asuransi jamkesko dan JKSS. Total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk tahun 2024 sebesar Rp 79,986,086,064 bersumber dana APBD maupun DAK. Secara rinci rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Solok

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2024						Sumber Usulan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana				Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					APBD	DAK	APBD Prov	APBN					
				79,986,086,064									84,675,200,000
AKI			75									75	
AKB			6									6	
AKABA			8									8	
Capaian penurunan Angka Kesakitan			70 %									75 %	
Indeks Keluarga Sehat			0.700									0.800	
Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar kesehatan			95 %									95 %	
UHC			98 %									99 %	
Nilai evaluasi LAKIP dinas kesehatan Kota Solok			BB									BB	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	-												
Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor			100 %	44,393,475,070	√					√		100 %	45,048,500,000
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-												
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			100 %	32.500.000	√					√		100 %	36.000.000
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	-	Solok	2 dok	17,000,000	√					√		2 dok	19.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		7 Laporan	15,500.000	√					√		7 Laporan	17.000.000
<b>Administrasi Keuangan PD</b>													
Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN													
Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Solok	330 Orang/bulan	36.700.000.570	√					√		330 Orang/bulan	37.012.000.000
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semsteran SKPD	-												
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/semesteran SKPD			4 Laporan	8.808.200	√					√		4 Laporan	12.000,000

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2024							Sumber Usulan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana				Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					APBD	DAK	APBD Prov	APBN					
	-												
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah</b>		100 %	<b>444,946,300</b>	√					√		100 %	<b>518.000.000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinkes	1 Paket	33,801.200	√					√		1 Paket	35.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinkes	1 paket	52.085.400	√					√		1 paket	60.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKK	1 paket	120,000,000	√					√		1 paket	125,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinkes	6 paket	35,000,000	√					√		6 paket	43,536,000
Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	50 laporan	204,059,700	√					√		50 laporan	257,597,500
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan barang milik daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>155,000,000</b>	√					√		<b>100 %</b>	<b>190,000,000</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinkes	4 unit	155,000,000	√					√		4 unit	<b>190,000,000</b>
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan jasa penunjang operasional kantor</b>		<b>100 %</b>	<b>5,802,220,000</b>								<b>100 %</b>	<b>6,002,500,000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkes	4 laporan	2,220,000	√					√		4 laporan	2,500,000
	- Jasa Pengiriman Surat		12 bulan									12 bulan	

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2024							Sumber Usulan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana				Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD	DAK	APBD Prov	APBN						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinkes	36	laporan	800,000,000	√					√		36	laporan	900,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinkes	28	Laporan	5,000,000,000	√					√		28	Laporan	5,100,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,250,000,000</b>								<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,290,000,000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dinkes	124	Unit	900,000,000	√					√		124	Unit	910,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKK	2	unit	260,000,000	√					√		2	unit	280,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- 4	unit	90,000,000		132,161,000	√					√		90,000,000		100,000,000
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	- Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar		100	%	<b>35,148,735,994</b>								100	%	<b>39,134,000,000</b>
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	- Jumlah pengadaan obat essensial yang sesuai kebutuhan		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>17,507,129,094</b>	√					√		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>20,710,000,000</b>
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	IFAL	3	unit	1,640,000,000	√					√		3	unit	1,740,000,000

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2024							Sumber Usulan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana				Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					APBD	DAK	APBD Prov	APBN					
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang MediFasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Puskesmas dan Labkesda	10 unit	14,937,129,094	√					√		10 unit	18,000,000,000
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Puskesmas	2 paket	340,000,000	√					√		2 paket	370,000,000
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya bahan medis habis pakai	Puskesmas	1 paket	560,000,000	√					√		1 paket	600,000,000
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Alat Laboratorium Kesehatan		10 unit	30,000,000	√					√		10 unit	30,000,000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Bumil, Bulin, bufas dengan Komplikasi		90 %	17,635,006,900								90 %	18,416,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Solok	1582 dok	9,000,000	√					√		1582 dok	10,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1510 orang	28,000,000	√					√		1510 orang	33,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1438 orang	28,000,000	√					√		1438 orang	33,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		7037 orang	5,000,000	√	√				√		7037 orang	5,500,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		12320 orang	15,000,000	√	√				√		12320 orang	0

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2024							Sumber Usulan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana				Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					APBD	DAK	APBD Prov	APBN					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	- Jumlah Penduduk UsiProduktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		52859 orang	11,000,000	√						√	52859 orang	orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	- Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		5696 orang	85,000,000	√						√	5696 orang	90,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	- Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar		13151 Orang	9,000,000	√						√	13151 Orang	11,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	- Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan elayanan Kesehatan Sesuai Standar		608 Orang	10,000,000	√						√	608 Orang	11,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		159 Orang	40,000,000	√						√	159 Orang	44,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	- Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		2372 orang	9,000,000	√						√	2372 orang	11,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		41 Dokumen	75,000,000	√						√	41 Dokumen	88,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis	- Jumlah Dokumen HasiPengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi		2 Dokumen	6,000,000	√						√	2 Dokumen	6,600,000

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2024							Sumber Usulan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana				Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					APBD	DAK	APBD Prov	APBN					
Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		14 Dokumen	350,000,000	√					√		14 Dokumen	650,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Jumlah Dokumen HasiPengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		10 Dokumen	4,300,000	√					√		10 Dokumen	4,500,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Jumlah Dokumen HasiPengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		16 Dokumen	87,000,000	√					√		16 Dokumen	95,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	- Jumlah Dokumen HasiPengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		21 Dokumen	20,000,000	√					√		21 Dokumen	22,000,000
Pengelolaan surveilans kesehatan	- Jumlah Dokumen HasiPengelolaan Surveilans Kesehatan		56 Dokumen	4,012,000	√					√		56 Dokumen	4,400,000
Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	- Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		696 Orang	10,000,000								696 Orang	11,000,000
	-												
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		8 Dokumen	138,000,000	√					√		8 Dokumen	150,000,000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	- Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		41 Dokumen	115,000,000								41 Dokumen	122,000,000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Jumlah Dokumen Hasi Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		17 Dokumen	13,700,000,000	√					√		17 Dokumen	14,000,000,000

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2024							Sumber Usulan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana				Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					APBD	DAK	APBD Prov	APBN					
Penyelenggaraan Kota Sehat	- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		11 Dokumen	66,000,000	√					√		11 Dokumen	66,000,000
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		27 Dokumen	950,000,000	√					√		27 Dokumen	1,000,000,000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		4 unit	38,194,900	√					√		4 unit	43,000,000
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	- Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		1 unit	1,790,000,000								1 unit	1,850,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	- Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		19315 keluarga	8,500,000								19315 keluarga	10,000,000
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	- Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		2859 Orang	30,000,000								2859 Orang	33,000,000
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/ Kota</b>				<b>6,600,000</b>									<b>8,000,000</b>
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	- Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan		1 unit	1,600,000	√					√		1 unit	30,750,500

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2024							Sumber Usulan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana									
					APBD	DAK	APBD Prov	APBN	Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Ditindaklanjuti Perizinannya													
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		4 unit	5,000,000	√						√		4 unit	6,000,000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>				<b>250,500,000</b>										<b>278,000,000</b>
<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>				<b>5,500,000</b>										<b>8,000,000</b>
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Jumlah Dokumen HasiPerencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia		2 dokumen	3,500,000	√						√		2 dokumen	5,000,000
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		286 orang	2,000,000	√						√		286 orang	3,000,000
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>245,000,000</b>										<b>270,000,000</b>
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan		60 orang	245,000,000	√						√		60 orang	270,000,000

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2024							Sumber Usulan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana				Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					APBD	DAK	APBD Prov	APBN					
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya												
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>				76,800,000									86,200,000
<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>				1,300,000									2,000,000
<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga</b>				1,000,000									1,700,000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		51 dokumen	1,000,000	√					√		51 dokumen	1,700,000
	- Uji sampel pangan		12 paket									12 paket	
<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah</b>				70,000,000									77,000,000

Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2024							Sumber Usulan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana				Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					APBD	DAK	APBD Prov	APBN					
<b>Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>													
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen HasiPengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		18 dokumen	70,000,000	√					√		18 dokumen	77,000,000
<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>				4,500,000									5,500,000
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen HasiPengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		52 Dokumen	4,500,000	√					√		52 Dokumen	4,500,000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>				116,575,000									128,500,000
<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>				1,575,000									2,000,000
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan		4 dokumen	1,575,000	√						√	4 dokumen	2,000,000

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2024							Sumber Usulan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana				Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					APBD	DAK	APBD Prov	APBN					
	Masyarakat												
<b>Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>				100,000,000									110,000,000
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	- Jumlah Dokumen HasiPenyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		5 dokumen	100,000,000	√						√	5 dokumen	110,000,000
<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>15,000,000</b>									<b>16,500,000</b>
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	- Jumlah Dokumen HasiBimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		10 dokumen	15,000,000	√						√	10 dokumen	16,500,000

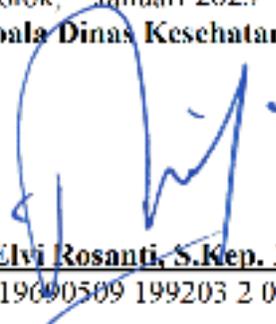
## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kesehatan kota Solok merupakan bentuk rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan dan sasaran serta memperhatikan isu-isu strategis dengan berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tahun 2024 diusulkan program sebanyak 5 Program dengan 19 kegiatan dan 65 sub kegiatan yang berasal dari dana APBD Kota Solok. Dengan ditetapkannya Renja tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Kerja Anggaran (RKA) untuk kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Solok, Januari 2023  
**Kepala Dinas Kesehatan**

  
**DR. Ns. Elvi Rosanti, S.Kep. M.Kes**  
NIP. 19690509 199203 2 003

**WALIKOTA SOLOK**

**ZUL ELFIAN UMAR**

## GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)</b>			
PERANGKAT	:	DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK	
TAHUN ANGGARAN	:	2024	
PROGRAM	:	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	:	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
Tujuan kegiatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan pelayanan usia lanjut sesuai standar</li> <li>➤ Meningkatkan usia harapan hidup ( UHH )</li> </ul>	
ANALISIS SITUASI		<p><b>1.Data pembuka wawasan</b> <u>Data Umum :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Lansia yang ada di Kota Solok tahun 2023 sebanyak 5.696 orang ( L = 2.630, P = 3.066) ; berdasarkan angka proyeksi</li> <li>2. Lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2022 sebanyak 4.052 (74,4%) dengan rincian Laki-laki sebanyak 1.698 orang (67,6%) dan perempuan sebanyak 2.354 orang (80,2%)</li> <li>3. Adanya lansia yang membutuhkan penyuluhan kesehatan di Lembaga Perumahan</li> </ol>	
		<p><b>Akses :</b> Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan untuk lansia, cakupannya belum optimal</p> <p><b>Partisipasi :</b> Partisipasi kelompok lansia untuk mengikuti kegiatan Pelayanan Kesehatan Lansia belum terlibat secara optimal.</p> <p><b>Kontrol :</b> Pelaksana program belum maksimal dalam melaksanakan pelayanan kesehatan lansia</p> <p><b>Manfaat :</b> Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap lanjut usia diperlukan untuk mewujudkan lansia yang sehat, berkualitas, dan produktif di masa tuanya belum berjalan optimal</p>	
Perencanaan Kegiatan	Rencana Aksi	Kegiatan	Pemberian PMT Bagi Lansia
			Alokasi Anggaran
			Keluaran

	Hasil	Meningkatnya pengetahuan keluarga lansia dalam menyediakan makanan tambahan yang bergizi untuk lansia
Kegiatan	Senam lansia	
	Alokasi Anggaran	
	Keluaran	Terlaksananya senam lansia
	Hasil	Meningkatnya kebugaran lansia

Alokasi Sumber Daya	Dana	Jumlah dana : Rp. 85.000.000,-
	SDM	1. Kader Posyandu Lansia 2. Instruktur senam lansia 3. Petugas Pembina Posyandu lansia
	Sarana dan Prasarana	1. Daftar menu 2. Bahan pangan 3. Piranti pengolahan dan penyajian makanan 4. Sound sistem 5. Form pencatatan dan pelaporan
Dampak/hasil Output kegiatan	<b>1.Tolak ukur</b> - Meningkatkan pelayanan usia lanjut sesuai standar - Meningkatkan usia harapan hidup ( UHH ) <b>2.Indikator dan target kinerja</b> <b>Output:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah penyuluhan lansia di Lembaga permasyarakatan : 9 kali</li> <li>➤ Jumlah pemberian PMT penyuluhan di Posyandu lansia : 12 kali</li> <li>➤ Senam lansia dengan instruktur senam : 12 kali</li> </ul>	
	<b>Outcome :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan pelayanan usia lanjut sesuai standar</li> <li>➤ Meningkatkan usia harapan hidup ( UHH )</li> </ul>	

Solok, 19 Januari 2023  
Kepala Dinas Kesehatan

**Dr. Ns. Elvi Rosanti, S.Kep, MKes**  
NIP. 19690509 199203 2 003

**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

KOLOM 1	SKPD	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
KOLOM 2	Data Pembuka Wawasan ( Data terpilah Gender )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Lansia yang ada di Kota Solok tahun 2023 : 5.696 ( L = 2.630, P = 3.066)</li> <li>- Jumlah Lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Januari s/d Desember tahun 2022 adalah ( L = 1.698; P = 2.354)</li> <li>- Persentase Lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Januari s/d Desember tahun 2022 adalah 74,4 % ( L = 67,6 % ; P = 80,2 % )</li> <li>- Adanya lansia yang membutuhkan penyuluhan kesehatan di Lembaga Permasalahatan</li> </ul>
KOLOM 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan ( Akses, partisipasi, kontrol, Manfaat ) <p><b>Akses :</b> Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan untuk lansia, cakupannya belum optimal</p> <p><b>Partisipasi :</b> Partisipasi kelompok lansia untuk mengikuti kegiatan Pelayanan Kesehatan Lansia belum terlibat secara optimal.</p> <p><b>Kontrol :</b> Pelaksana program belum maksimal dalam melaksanakan pelayanan kesehatan lansia</p> <p><b>Manfaat :</b> Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap lanjut usia diperlukan untuk mewujudkan lansia yang sehat, berkualitas, dan produktif di masa tuanya belum berjalan optimal</p>
KOLOM 4		Sebab Kesenjangan Internal <p>Belum optimalnya kinerja pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan untuk lansia</p>
KOLOM 5		Sebab kesenjangan Eksternal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya keterlibatan kelompok lansia dalam mengikuti kegiatan pelayanan kesehatan lansia.</li> <li>- Adanya kelompok lansia di Lembaga permasalahatan yang belum tersentuh pelayanan kesehatan</li> </ul>
KOLOM 6		Reformulasi Tujuan
KOLOM 7	Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> <li>- Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan bagi Lansia</li> </ul>

Kolom 8	Pengukuran Hasil	Data dasar ( Base Line )		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Lansia yang ada di Kota Solok tahun 2023 sebanyak 5.696 orang ( L = 2.630, P = 3.066) ; berdasarkan angka proyeksi</li> <li>- Lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Januari s/d Desember tahun 2022 sebanyak 4.052 (74,4 %) dengan rincian Laki-laki sebanyak 1.698 orang (67,6%) dan perempuan sebanyak 2.354 orang (80,2%)</li> <li>- Adanya lansia yang membutuhkan penyuluhan kesehatan di Lembaga Perumahan</li> </ul>
KOLOM 9		Indikator Kinerja	Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Jumlah penyuluhan lansia di Lembaga perumahan</li> <li>➢ Jumlah pemberian PMT bagi Lansia</li> <li>➢ Senam lansia dengan instruktur senam</li> <li>➢ Survey Pelayanan Kesehatan lansia oleh Petugas</li> </ul>
			Outcome	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Meningkatnya usia harapan hidup</li> <li>➢ Meningkatnya cakupan pelayanan usia lanjut sesuai standar</li> </ul>

**Solok, 19 Januari 2023**  
**Kepala Dinas**

**Dr. Ns. Elvi Rosanti, S.Kep. M.Kes**  
**NIP. 19690509 199203 2 003**

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)**

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)</b>		
PERANGKAT	:	DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN	:	2024
PROGRAM	:	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Tujuan kegiatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan pelayanan usia lanjut sesuai standar</li> <li>➤ Meningkatkan usia harapan hidup ( UHH )</li> </ul>
ANALISIS SITUASI		<p><b>1.Data pembuka wawasan</b></p> <p><u>Data Umum :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AKI Tahun 2022 adalah 146,9 per 100.000 kelahiran hidup</li> <li>➤ AKB Tahun 2022 adalah 8,8 per 1000 kelahiran hidup</li> <li>➤ Pengetahuan ibu tentang tanda-tanda bahaya kehamilan masih kurang (40%)</li> <li>➤ Keikutsertaan suami dalam kelas ibu hamil masih rendah (5%)</li> <li>➤ Jumlah Kelas Ibu hamil Tahun 2022 adalah 32 kelas</li> <li>➤ Jumlah Posyandu 88 buah</li> <li>➤ Jumlah kelas ibu hamil</li> <li>➤ Jumlah Bidan 215 orang</li> </ul>
		<p><b>Faktor Kesenjangan :</b></p> <p><b>Akses :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kesempatan ibu untuk pergi ke pelayanan kesehatan terbatas krn pendidikan ibu yang rendah serta kurangnya dukungan suami/keluarga</li> <li>➤ Akses untuk mendapatkan informasi mengenai tanda2 bahaya sudah cukup baik tetapi karena rendahnya pendidikan sehingga tidak dimanfaatkan secara optimal oleh ibu dan suami</li> <li>➤ Akses informasi tentang KIA, kespro dan KB pada laki-laki masih kurang</li> </ul> <p><b>Partisipasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Partisipasi suami dalam ber-KB masih rendah</li> <li>➤ Kurangnya pengetahuan dan kepedulian suami terhadap kesehatan ibu hamil</li> </ul>

	<p><b>Kontrol :</b></p> <p>Pengambilan keputusan tergantung pada suami dan keluarga, sehingga ibu tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri</p> <p><b>Manfaat :</b></p> <p>Belum maksimalnya pemanfaatan media promosi dan kelas ibu karena kurangnya peran suami</p> <hr/> <p>Penyebab Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Petugas kesehatan kurang melibatkan peran serta laki-laki dalam kesehatan ibu dan anak</li> <li>➤ Petugas kesehatan hanya fokus pada kesehatan reproduksi perempuan</li> </ul> <p>Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pandangan masyarakat bahwa perempuan banyak anak adalah hal yang biasa</li> <li>➤ sudah tugas perempuan untuk hamil dan melahirkan</li> <li>➤ perempuan yang meninggal sewaktu melahirkan adalah mati syahid</li> <li>➤ dalam mengambil keputusan harus menunggu suami/bapak/nenek,dll</li> <li>➤ pandangan bahwa kespro atau KB hanya milik perempuan</li> </ul> <p>Ibu lebih memilih melahirkan di rumah dibanding di fasilitas kesehatan</p>
--	---

Perencanaan Kegiatan	Rencana Aksi	Kegiatan 1	Membentuk kelas ibu hamil tingkat posyandu dengan mengikut sertakan suami
		Alokasi Anggaran	Rp.,-
		Keluaran	Terbentuknya kelas ibu hamil tingkat posyandu dengan mengikut sertakan suami
		Hasil	Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil tingkat posyandu dengan mengikut sertakan suami
		Kegiatan 2	Sosialisasi P4K kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama (terutama laki-laki)
		Alokasi Anggaran	Rp. -
		Keluaran	Terlaksananya pertemuan Sosialisasi P4K kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama (terutama laki-laki)

			Hasil	Adanya dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dan agama (terutama laki-laki) terhadap program P4K
--	--	--	-------	---

Alokasi Sumber Daya	Dana	Jumlah dana : Rp. 9.000.000,-
	SDM	1. Kader Posyandu 2. Petugas Pembina Posyandu 3. 4 Puskesmas
	Sarana dan Prasarana	1. Daftar menu 2. Bahan pangan 3. Piranti pengolahan 4. Sound sistem 5. Form pencatatan dan pelaporan
Dampak/hasil Output Kegiatan	<p><b>1.Tolak ukur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar</li> <li>➤ Meningkatkan usia harapan hidup ( UHH )</li> </ul> <p><b>2.Indikator dan target kinerja</b></p> <p><b>Output:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terbentuknya kelas ibu hamil tingkat posyandu dengan mengikut sertakan suami</li> <li>➤ Terlaksananya pertemuan Sosialisasi P4K kepada tokoh-</li> </ul>	
	<p><b>Outcome :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar</li> <li>➤ Meningkatkan usia harapan hidup ( UHH )</li> </ul>	

Solok, 19 Januari 2023  
Kepala Dinas Kesehatan

**Dr. Ns. Elvi Rosanti, S.Kep, MKes**  
NIP. 19690509 199203 2 003

**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

KOLOM 1	SKPD	DINAS KESEHATAN	
	PROGRAM	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
KOLOM 2	Data Pembuka Wawasan ( Data terpilah Gender )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AKI Tahun 2022 adalah 146,9 per 100.000 kelahiran hidup</li> <li>- AKB Tahun 2022 adalah 8,8 per 1000 kelahiran hidup</li> <li>- Pengetahuan ibu tentang tanda-tanda bahaya kehamilan masih kurang (40%)</li> <li>- Keikutsertaan suami dalam kelas ibu hamil masih rendah (5%)</li> <li>- Jumlah kelas ibu hamil tahun 2023 adalah 38</li> <li>- Jumlah Posyandu 88</li> <li>- Jumlah Bidan 215</li> </ul>	
KOLOM 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan ( Akses, partisipasi, kontrol, Manfaat )	<p><b>Akses :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kesempatan ibu untuk pergi ke pelayanan kesehatan terbatas krn pengetahuan ibu yang rendah serta kurangnya dukungan suami/keluarga</li> <li>➤ Akses untuk mendapatkan informasi mengenai tanda2 bahaya sudah cukup baik tetapi karena rendahnya pendidikan sehingga tidak dimanfaatkan secara optimal oleh ibu dan suami</li> <li>➤ Akses informasi tentang KIA, kespro dan KB pada laki-laki masih kurang</li> </ul> <p><b>Partisipasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Partisipasi suami dalam ber-KB masih rendah</li> <li>➤ Kurangnya pengetahuan dan kepedulian suami terhadap kesehatan ibu hamil</li> </ul> <p><b>Kontrol :</b></p> <p>Pengambilan keputusan tergantung pada suami dan keluarga, sehingga ibu tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri</p> <p><b>Manfaat :</b></p> <p>Belum maksimalnya pemanfaatan media promosi dan kelas ibu karena kurangnya peran suami</p>
KOLOM 4		Sebab Kesenjangan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Petugas kesehatan kurang melibatkan peran serta laki-laki dalam kesehatan ibu dan anak</li> <li>➤ Petugas kesehatan hanya fokus pada kesehatan reproduksi perempuan</li> </ul>

KOLOM 5		Sebab kesenjangan Eksternal		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pandangan masyarakat bahwa perempuan banyak anak adalah hal yang biasa</li> <li>➤ sudah tugas perempuan untuk hamil dan melahirkan</li> <li>➤ perempuan yang meninggal sewaktu melahirkan adalah mati syahid</li> <li>➤ dalam mengambil keputusan harus menunggu suami/bapak/nenek,dll</li> <li>➤ pandangan bahwa kespro atau KB hanya milik perempuan</li> <li>➤ Ibu lebih memilih melahirkan di rumah dibanding di fasilitas kesehatan</li> </ul>
KOLOM 6	Reformulasi Tujuan			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menurunkan AKI dan AKB dengan melibatkan peran serta laki-laki</li> <li>➤ Meningkatkan cakupan program dengan mengikutsertakan partisipasi laki-laki</li> <li>➤ Meningkatkan partisipasi laki-laki dalam ber-KB</li> <li>➤ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan suami, tokoh2 masyarakat</li> <li>➤ Meningkatkan usia harapan hidup(UHH)</li> </ul>
KOLOM 7	Rencana Aksi			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membentuk kelas ibu hamil tingkat posyandu dengan mengikut sertakan suami</li> <li>➤ Sosialisasi P4K kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama (terutama laki-laki)</li> </ul>
Kolom 8	Pengukuran Hasil	Data dasar ( Base Line )		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AKI Tahun 2022 adalah 146,9 per 100.000 kelahiran hidup</li> <li>➤ AKB Tahun 2022 8,8 per 1000 kelahiran hidup</li> </ul>
KOLOM 9		Indikator Kinerja	Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terbentuknya kelas ibu hamil tingkat posyandu dengan mengikut sertakan suami</li> <li>➤ Terlaksananya pertemuan Sosialisasi P4K kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama (terutama laki-laki)</li> </ul>
			Outcome	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatnya cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar</li> <li>➤ Menurunkan AKI, AKB, dan Stunting</li> </ul>

**Solok, 19 Januari 2023**

**Kepala Dinas**



**Dr. Ns. Elvi Rosanti, S.Kep. M.Kes**  
**NIP. 19690509 199203 2 003**